

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gerynaldi Leite Fahik¹, Maria Prudensiana Leda Muga², Minarni Anachi Dethan³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: gerynaldi01@gmail.com

Article History

Received: 08-10-2025

Revision: 12-11-2025

Accepted: 12-11-2025

Published: 15-11-2025

Abstract. *The purpose of this study is to determine the effect of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) contributions on the Regional Original Revenue (PAD) of East Nusa Tenggara Province, both partially and simultaneously. This research employs a quantitative method using secondary time-series data from 2019 to 2023, obtained through documentation from the Regional Revenue and Asset Agency (BAPENDA) of East Nusa Tenggara Province. The data collection technique used in this study is documentation. The data analysis methods include the classical assumption test, multiple linear regression model, and hypothesis testing. The results of the study indicate that the Motor Vehicle Tax and the Motor Vehicle Title Transfer Fee have both partial and simultaneous effects on the Regional Original Revenue of East Nusa Tenggara Province. The Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee show a strong correlation with Regional Original Revenue, amounting to 0.964. The influence of both variables on Regional Original Revenue is 96.4%, while the remaining 3.6% is influenced by other factors not included in this study.*

Keywords: *Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), Regional Original Revenue (PAD)*

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berjenis *time series* (2019-2023) yang diperoleh melalui dokumentasi dari BAPENDA Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mencakup uji asumsi klasik, model regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai hubungan yang kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0.964, sedangkan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 96,4% sedangkan sisanya sebesar 3,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

How to Cite: Fahik G. L., Muga M. P. L., Dethan M. A. (2025). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 7249-7260. [10.54373/ifjeb.v5i4.4338](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i4.4338)

PENDAHULUAN

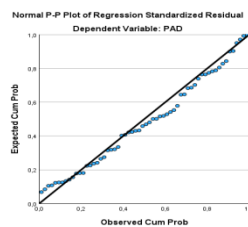
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut Soemitro (2017), pajak adalah sumbangan masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat diberlakukan dan tidak disertai dengan penerimaan jasa atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah kendaraan bermotor menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2019-2022. Tahun 2019-2020 terjadi peningkatan 16,41%, namun menurun 3,98% pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 yang menekan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Tahun 2022 kembali meningkat 4,77% seiring pemulihan ekonomi. Dinamika ini berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, yang secara langsung memengaruhi stabilitas PAD NTT.

Data realisasi PAD NTT juga menunjukkan fluktuasi yang sejalan dengan perkembangan PKB dan BBNKB. Tahun 2020 PAD menurun sebesar 7,64% akibat dampak pandemi, namun kembali meningkat 4,71% pada 2021 dan 10,15% pada 2022. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas ekonomi, kepemilikan kendaraan, dan penerimaan pajak daerah. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Nurhayati (2023) menemukan bahwa PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD di DKI Jakarta, sementara BBNKB tidak berpengaruh secara parsial. Sebaliknya, Islami & Rahmawati (2020) di Jawa Timur menyatakan bahwa PKB dan BBNKB merupakan penyumbang terbesar PAD. Bakhtiar (2023) menunjukkan penurunan kontribusi PKB selama pandemi, sedangkan Atteng (2019) menyebut kontribusinya tetap besar di Sulawesi Utara. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya *research gap* dalam memahami sejauh mana PKB dan BBNKB berkontribusi terhadap PAD di masing-masing daerah. Penelitian Aliah & Hamzah (2019) bahkan lebih menekankan pentingnya aspek kebijakan dan pengelolaan tanpa menyajikan hubungan kuantitatif antar variabel. Perbedaan temuan ini mencerminkan adanya celah (*research gap*) terkait kontribusi dan pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD, baik dari segi hasil yang tidak konsisten, pendekatan metodologis yang bervariasi, maupun fokus analisis yang berbeda antar wilayah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk mengetahui peran pajak daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau time series, yang selama lima tahun, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2023. Data penerimaan pajak dalam bentuk data berkala terdiri dari rangkaian data dari tahun 2019 hingga tahun tersebut mencakup kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pendapatan asli daerah. Informasi diperoleh dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BAPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data langsung melalui dokumentasi. Metode analisis data yang akan diterapkan mencakup uji asumsi klasik, model regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2018).



HASIL

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS), didalam uji asumsi klasik terdapat tiga yaitu uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

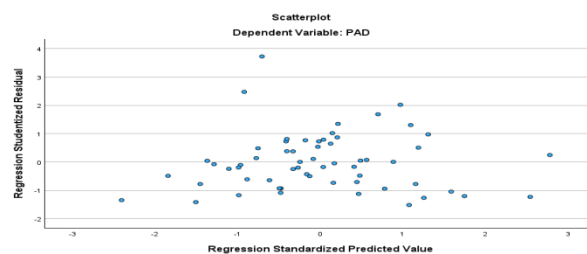
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak, untuk menguji hal tersebut dapat dipergunakan metode grafis Normal P-P Plot dari *standartized residual cumulative probability*, dengan identifikasi apabila sebarannya berada di sekitar garis normal, maka asumsi kenormalan dapat dipenuhi.

Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan gambar diatas, bahwa data tersebar secara merata di sekitar garis lurus dan tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan atau pola penyebaran yang menyimpang jauh dari garis tersebut. Distribusi data yang mengikuti garis lurus ini mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi cenderung berdistribusi normal, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi, yang berarti bahwa model regresi yang digunakan memenuhi salah satu syarat penting dalam analisis statistik.

2) Uji Homoskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas, tetapi jika tidak, maka terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 2.** Diagram Sebar (*Scatterplot*)

Berdasarkan hasil pengujian homoskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan scatter plot sebagaimana ditampilkan grafik pada gambar, terlihat bahwa titik-titik data yang muncul tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Sebaliknya, titik-titik tersebut tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu y tanpa menunjukkan pola yang jelas atau tren tertentu. Pola penyebaran yang tidak beraturan ini menjadi indikasi kuat bahwa varians dari residual bersifat konstan pada setiap tingkat variabel independen, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan, tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik mengenai homoskedastisitas terpenuhi.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	PKB	.968	1,033
	BBNKB	.968	1,033

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih kecil dari 10 atau nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10, secara lebih rinci, variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki nilai VIF sebesar 1,033, sementara variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan nilai VIF yang sama, yaitu 1,033. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi yang digunakan, dengan kata lain model regresi yang dianalisis terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada korelasi yang sangat kuat antara variabel bebas yang dapat mengganggu estimasi parameter regresi.

Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression*)

Analisis regresi menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen yang lebih terkait dengan hubungan bersifat statistik. Model regresi dalam penelitian yang peneliti pilih, terdapat dua independen yaitu; pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	(B)	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	10707480386	2700764213	-	3.965	< .001	-	-
PKB	2.238	0.143	0.395	15.635	< .001	0.968	1.033
BBNKB	2.939	0.089	0.832	32.923	< .001	0.968	1.033

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji regresi linier berganda, maka dapat dimasukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,0707 + E10 + 2,238 * X1 + 2,939 * X2 + \sum i$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,0707E+10 mengindikasikan bahwa tanpa adanya kontribusi dari variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan sebesar 10.707.480.368. Nilai ini menggambarkan besarnya PAD yang dapat diperoleh tanpa pengaruh langsung dari kedua variabel bebas tersebut. Koefisien regresi variabel PKB (X_1) sebesar 2,238 menunjukkan bahwa setiap peningkatan PKB sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan PAD sebesar 223,8%. Sebaliknya, penurunan PKB sebesar 1% akan menurunkan PAD sebesar 223,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD.

Sementara itu, koefisien regresi variabel BBNKB (X_2) sebesar 2,939 menunjukkan bahwa setiap peningkatan BBNKB sebesar 1%, dengan variabel lainnya tetap, akan meningkatkan PAD sebesar 293,9%. Sebaliknya, penurunan BBNKB sebesar 1% akan menurunkan PAD sebesar 293,9%. Temuan ini mengindikasikan bahwa BBNKB memberikan pengaruh positif yang lebih besar dibandingkan PKB terhadap peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan penerimaan dari PKB dan BBNKB berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	(B)	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	10707480386	2700764213	-	3.965	< .001	-	-
PKB	2.238	0.143	0.395	15.635	< .001	0.968	1.033
BBNKB	2.939	0.089	0.832	32.923	< .001	0.968	1.033

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa variabel PKB memperoleh t-hitung sebesar 15.635 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, dimana t-hitung 15.635 > t-tabel 2.00172 maka H_1 di terima. Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa variabel

BBNKB memperoleh t-hitung sebesar 32.923 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, dimana t-hitung $32.923 > t\text{-tabel } 2.00172$ maka H_2 diterima.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Anova ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,154E+22	2	1,077E+22	780,667	< .001 ^b
	Residual	7,862E+20	57	1,379E+19		
	Total	2,232E+22	59			

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS (2015)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.4, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memperoleh F-hitung sebesar 780.667 dengan tingkat signifikan 0,001, dimana F-hitung $780.667 > F\text{-tabel } 3,159$ maka H_3 diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas Pengaruh Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil R^2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.965	.964	3713851824.0	1.141

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,982, yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel yang diteliti. Sementara itu, nilai adjusted R Square atau koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,964. Nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,964, hal ini menunjukkan bahwa 96,4% variasi yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun sisanya sebesar 3,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini, seperti

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, maupun faktor ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

DISKUSI

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji signifikan parsial (uji t) yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil daripada batas signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara PKB dan PAD. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel PKB memiliki nilai koefisien beta (Standardized Beta) sebesar 0,395 dan signifikan secara statistik terhadap PAD. Nilai koefisien beta yang positif menunjukkan adanya hubungan searah antara PKB dan PAD, artinya setiap peningkatan dalam penerimaan PKB akan diikuti oleh peningkatan PAD dengan kontribusi sebesar 39,5% terhadap variabel dependen.

Kontribusi ini dapat dijelaskan karena PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang bersifat wajib dan berulang setiap tahun, sehingga cenderung memberikan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula potensi penerimaan dari sektor PKB. Hal ini menunjukkan bahwa PKB merupakan salah satu komponen utama PAD yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah. Menurut Stakeholder Theory, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak, tetapi juga dari sejauh mana penerimaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan PKB terhadap PAD menegaskan posisi strategis PKB sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan dari PKB dikelola secara efisien dan transparan, serta digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar et al. (2023), yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan pengaruh sebesar 20,39% terhadap PAD Kota Palopo pada periode 2018–2021. Walaupun peningkatannya tergolong sedang, namun PKB tetap menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji signifikan parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis alternatif (H_2) diterima. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara BBNKB dan PAD. Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh bahwa variabel BBNKB memiliki nilai koefisien beta (Standardized Beta) sebesar 0,832, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Nilai ini mengindikasikan bahwa BBNKB merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi PAD dibandingkan variabel lainnya dalam model penelitian.

Secara substansial, tingginya pengaruh BBNKB terhadap PAD dapat dijelaskan oleh sifat pajak ini yang dikenakan setiap kali terjadi peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam pembelian kendaraan, secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan BBNKB.

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, setiap kebijakan perpajakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama. Oleh karena itu, penerimaan dari BBNKB perlu dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Islami & Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa BBNKB memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selama periode 2013-2017, kontribusi BBNKB menunjukkan tren positif yang membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) diperoleh nilai F-hitung sebesar 780,667, sedangkan F-tabel sebesar 3,159 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H_3 diterima. Hal ini berarti bahwa PKB dan BBNKB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai hubungan sebesar 0,982, yang menandakan hubungan yang sangat kuat antara PKB, BBNKB, dan PAD. Sementara itu, nilai koefisien

determinasi (R^2) sebesar 0,964 berarti bahwa 96,4% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variabel PKB dan BBNKB, sedangkan sisanya sebesar 3,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak, melainkan merupakan hasil dari kontribusi sinergis berbagai sumber penerimaan daerah. PKB sebagai pajak yang bersifat tahunan memberikan pendapatan stabil, sedangkan BBNKB sebagai pajak berbasis transaksi memberikan tambahan penerimaan yang fluktuatif namun signifikan. Kombinasi keduanya menciptakan struktur pendapatan yang saling melengkapi, yang mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, pemerintah daerah sebagai pengelola pajak memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa penerimaan dari PKB dan BBNKB digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pemerataan hasil pembangunan. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Nurhayati et al (2023) yang menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, mampu mengalokasikan penerimaan dari kedua pajak tersebut untuk mendukung sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB memiliki peran strategis dalam memperkuat keuangan daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD, baik secara parsial maupun simultan. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial, BBNKB memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap PAD dengan nilai *standardized beta* sebesar 0,832, dibandingkan dengan PKB yang memiliki nilai *beta* sebesar 0,395. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas transaksi balik nama kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah, terutama pada periode meningkatnya transaksi jual beli kendaraan, sedangkan PKB tetap menjadi sumber pendapatan rutin yang stabil dan berkelanjutan bagi daerah. Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang berarti bahwa optimalisasi penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut akan

berimplikasi positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Temuan ini sejalan dengan *Stakeholder Theory*, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara optimal guna memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan daerah.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis kemukakan. Pertama, bagi objek penelitian, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, disarankan untuk terus meningkatkan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, perbaikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta penguatan kegiatan sosialisasi agar tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat. Langkah-langkah tersebut penting dilakukan mengingat kedua jenis pajak ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama BBNKB yang memiliki pengaruh dominan. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan PKB dan BBNKB akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Kedua, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD, seperti pajak air permukaan, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Variabel-variabel tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut karena masing-masing memiliki kontribusi strategis terhadap pendapatan daerah. Pajak air permukaan mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan, retribusi daerah berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan daerah menunjukkan potensi pemanfaatan aset yang belum optimal, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah dapat memberikan tambahan fleksibilitas fiskal. Dengan memperluas cakupan penelitian terhadap variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

REFERENSI

Aliah, S., & Hamzah, R. (2019). Kebijakan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Keuangan Daerah*,

11(2), 88–97.

- Atteng, S. (2019). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*, 7(3), 211–219.
- Bakhtiar, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 22–30.
- Islami, R., & Rahmawati, D. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Daerah*, 9(1), 45–57.
- Nurhayati. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Daerah*, 12(2), 101–112.
- Nurhayati, S., Rahmawati, L., & Hidayat, R. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah secara Simultan di DKI Jakarta. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 67–78.
- Soemitro, R. (2017). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.